



Jurnal BADATI

Vol 6 No 1 April 2024

P-ISSN : 1907 – 5340

E-ISSN : 2722 – 3248

Halaman : 90 - 109

PENGEMBANGAN MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MISKIN DI KABUPATEN MALUKU TENGAH.

¹Samson Laurens ; ²Amelia Tahitu ; ³Cost Sahanaya

^{1,3}Program Studi ilmu kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Kristen Indonesia Maluku,

²Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Kristen Indonesia Maluku.

¹email : samsonlaurens27@gmail.com

²email : ameliatahиту01@gmail.com

³email : cossahanaya20@gmail.com

Abstrak

Perempuan miskin merupakan bagian dari komunitas miskin di pedesaan, yang aktivitas kesehariannya pada sektor informal dengan melakukan pekerjaan ganda sebagai ibu rumah tangga dan bekerja sebagai buruh tani, swasta untuk memperoleh pendapatan bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Perempuan miskin memiliki akses pendidikan rendah, dan pekerjaannya mudah untuk dilakukan, namun penuh tantangan. Pekerjaan perempuan miskin merupakan tantangan hidup yang dilakukan karena kondisi bertahan hidup demi memperoleh pendapatan bagi rumahtangga. Secara administrasi Kabupaten Maluku Tengah memiliki 18 Kecamatan, dengan jumlah 65,73 ribu penduduk, dan penduduk miskin sebesar 9,12 ribu orang, atau 17,46 persen, dari jumlah penduduk miskin sebesar 9,12 ribu orang atau 17,46 persen, maka perempuan miskin ada di sana, (BPS Provinsi Maluku, 2022). Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Salahutu, Leihitu, dan Leihitu, dengan lokasi penelitian, desa Tulehu, Waai, Asilulu, Liliboy, Negeri Lima dan Zeith. Penentuan responden berdasarkan kondisi dan fakta yang menyertai kriteria komunitas perempuan miskin di lokasi penelitian, yakni 60 responden yang mewakili desa ditiga kecamatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab kemiskinan menurut komunitas perempuan miskin itu sendiri, dan pengembangan model pemberdayaan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data; observasi, wawancara, dan angket. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil yang dicapai berdasarkan karakteristik responden sampel (perempuan miskin), dengan tingkat pendapatan yang rendah, standart rumah tidak layak huni, derajat kesehatan rendah, pendidikan dan pengetahuan yang minim sehingga mengakibatkan mereka (perempuan) perlu diberdayakan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Model Pemberdayaan, & Perempuan.

Abstract

Poor women are part of poor communities in rural areas, whose daily activities are in the informal sector by doing double jobs as housewives and working as farm laborers in the private sector to earn income to meet household needs. Poor women have low access to education, and their work is easy to do, but full of challenges. Poor women's work is a life challenge that is carried out because of survival conditions in order to earn income for the household. Administratively, Central Maluku Regency has 18 sub-districts, with a total population of 65.73 thousand, and the poor population is 9.12 thousand people, or 17.46 percent, out of the total poor population of 9.12 thousand people or 17.46 percent, so poor women are there, (BPS Maluku Province, 2022). This research was conducted in Salahutu, Leihitu and Leihitu sub-districts, with research locations, Tulehu, Waai, Asilulu, Liliboy, Negeri Lima and Zeith villages. The determination of respondents was based on conditions and facts accompanying the criteria for poor women's communities in the research location, namely 60 respondents representing villages in three sub-districts. The aim of this research is to describe the factors that cause poverty according to the poor women's community itself, and to develop an empowerment model. The method used is quantitative descriptive, with data collection techniques; observation, interviews, and questionnaires. Data were analyzed using descriptive methods. The results achieved were based on the characteristics of the sample respondents (poor women), with low income levels, uninhabitable housing standards, low health status, minimal education and knowledge, which resulted in them (women) needing to be empowered.

Keywords: Poverty, Empowerment Model, & Women.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang terus menjadi perhatian utama pemerintah. Kemiskinan adalah salah satu ukuran untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, disamping itu kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan *pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan*. Dimensi kemiskinan tidak hanya berada pada dimensi ekonomi, namun juga melibatkan dimensi lainnya, seperti sosial, budaya, politik, bahkan juga ideologi (Basuki & Presetyo, 2007).

Menurut (BPS Maluku, 2022) jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku mengalami peningkatan. Tercatat pada September 2022 terdapat 296,66 jiwa penduduk miskin. Angka tersebut meningkat dibandingkan Maret 2022, yang tercatat sebesar mengalami penurunan. Dalam lima tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku secara umum mengalami penurunan.

Kabupaten Maluku Tengah merupakan Kabupaten tertua di Provinsi Maluku, dengan jumlah penduduk hingga mencapai 65,73 ribu penduduk pada 2022, dan penduduk miskin di Kabupaten Maluku Tengah sebesar 9,12 ribu orang, atau 17,46 persen, (BPS Provinsi Maluku, 2022). Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Maluku Tengah (1). Memiliki 96,5 persen wilayahnya terdiri dari lautan, dengan penduduk miskin yang tersebar di desa sebanyak 17,46 persen (2). (3). Hasil observasi, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Maluku Tengah butuh penanganan dari pemerintah dan pihak-pihak terkait, walaupun trend angka kemiskinan semakin menurun jika dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota yang lain di Maluku, dimana penduduk miskin di sana sekitar 9,12 ribu orang atau 17,46 persen, termasuk perempuan. Dan perempuan lebih banyak menanggung beban kehidupan ekonomi rumah tangga, dan tidak lepas dari kondisi kehidupan yang miskin dan serba terbatas. Belum lagi hak-hak dasar mereka (*perempuan*), secara umum masih belum dapat dipenuhi seperti persoalan kebutuhan *pangan, kesehatan, pendidikan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman*, untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik di masyarakat. Dan aktivitas mereka (*perempuan*) di luar rumah, melakukan beban kerja ganda dengan bekerja keras membantu kaum laki - laki (*suami*) secara fisik dan mental, guna memberikan kontribusi pendapatan bagi pemenuhan kebutuhan keluarga. Perempuan miskin, sering mengalami ketidakmampuan pemenuhan ekonomi, dan gagal memenuhi hak-hak dasar dalam menjalani kehidupan secara martabat.

Karena kemiskinan selalu menampilkan wajah perempuan di depan. Banyak peneliti kontemporer mengungkapkan, dalam sebuah keluarga miskin, perempuan senantiasa sebagai katup penyelamat bagi perekonomian keluarga. Perempuan dianggap sebagai katup penyelamat bagi perekonomian keluarga dikarenakan oleh berbagai peran perempuan miskin yang diambil oleh perempuan miskin dalam keluarga (Marwanti & Astuti, 2011), meliputi: **pertama**, sebagai pengelola keuangan keluarga; **kedua**, sebagai penanggung jawab seluruh pekerjaan domestik; **ketiga**, sebagai pencari naf kah keluarga; dan **keempat**, sebagai salah satu simpul jaringan sosial yang penting dalam hal transfer sosial, khususnya pada masa- masa kritis dan krisis (Basuki & Prasetyo, 2007).

Padahal upaya pemerintah telah memperkenalkan paket dan program yang melibatkan sejumlah pakar kemiskinan nasional dan internasional. Penanggulangan kemiskinan selama ini telah ditangani melalui kebijakan dan mekanisme, misalnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat

(KUR), (BLT), tetapi kurang efektif karena banyak yang salah sasaran, serta UMKM melalui Koperasi untuk menyerap tenaga kerja, Berbagai kebijakan dan program pemerintah yang ada dirasakan masih kurang efektif dalam upaya menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, hal ini terbukti dengan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk miskin dari masa ke masa. Banyaknya program yang didaratkan bagi warga miskin termasuk Provinsi Maluku khusus di Kabupaten Maluku Tengah, ternyata tidak secara signifikan mempengaruhi menurunnya angka kemiskinan. Sebab itu butuh perhatian serius dari pemerintah dan pihak-pihak terkait, guna penanganan yang tepat dan efektif melalui kebijakan dan program pemberdayaan yang pro kelompok miskin (perempuan).

Berdasarkan latar belakang inilah, penelitian ini sangat penting dilaksanakan, demi menghasilkan kebijakan rekomendasi terkait pengembangan “*model pemberdayaan komunitas perempuan miskin*” di Kabupaten Maluku Tengah”. Sebab persoalan pemberdayaan bagi perempuan miskin selama ini belum efektif dilakukan, dan belum membuahkan hasil yang memuaskan. Sebab itu bagaimanapun pemerintah (*Negara*), harus hadir dan bertanggungjawab dalam melakukan pemberdayaan bagi warga miskin (*perempuan*), secara komperhensif dan terencana agar mereka (perempuan) dapat diberdayakan. Hal ini merupakan masalah tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, dalam usaha memberdayakan warga miskin.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan factor- faktor penyebab kemiskinan komunitas perempuan
2. Bagaimana pengembangan model pemberdayaan komunitas perempuan miskin.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terkait dengan pengembangan model pemberdayaan komunitas perempuan miskin.
2. Hasil penelitian akan dipublikasi pada berbagai jurnal /media masa .

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kemiskinan

Beberapa definisi dari lembaga maupun para ahli mengenai kemiskinan. **Bappenas**; mendefinisikan *kemiskinan, sebagai suatu kondisi atau situasi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menjalani hidupnya sampai pada suatu taraf yang dianggap tidak layak atau manusiawi*. **Biro Pusat Statistik**; mendefinisikan kemiskinan, adalah kondisi di mana seseorang hanya dapat memenuhi kebutuhan makan, kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari. **BKKBN**; mendefinisikan kemiskinan, adalah *keluarga miskin pra-sejahtera yang tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya, tidak mampu makan dua kali sehari, tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja, dan bepergian, bagian terluas rumah berlantai tanah, tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan*. **Menurut Bank Dunia**; kemiskinan, adalah *tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan US \$ 1 per hari*.

Dapat disimpulkan kemiskinan dari beberapa ahli, bahwa kemiskinan sebagai *ciri dan akibat ketidaksamaan dalam masyarakat yang menjadikan sebagian golongan tak mampu mencapai tingkat hidup layak, sesuai harapan dan cita-cita yang hidup dalam masyarakat*, ini berarti bahwa kemiskinan bukanlah sekedar masalah lebih miskin dari orang lain dalam suatu masyarakat, melainkan masalah tidak memilikinya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan material secara layak-kegagalan untuk mencapai tingkat kelayakan minimum tertentu. **Robert Chambers**, mengidentifikasi kemiskinan disebabkan karena lima factor utama yang saling terkait secara mikro, yang dinamakan “ketidak beruntungan” atau “*disadvantages*” yakni:

1. *Kemiskinan*, kemiskinan ini ditandai dengan rumah yang reot dan dibuat dari bahan bangunan yang bermutu rendah, perlengkapan yang sangat minim, dan tidak memiliki MCK sendiri, ekonomi keluarga ditandai dengan ekonomi gali lubang tutup lubang. Pendapatan mereka tidak menentu dalam jumlah yang sangat tidak memadai;
2. *Kelemahan fisik*, fisik yang lemah dapat menyebabkan orang miskin tingkat ketergantungan yang tinggi antara anggota keluarga tersebut dengan anggota keluarga dewasa yang sehat dalam mencari nafkah. Fisik yang lemah ini disebabkan karena kurang gizi, sehingga mereka tidak mampu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
3. *Keterasingan*, keterasingan keluarga miskin karena tempat tinggal mereka yang terisolasi secara geografis, yang menyebabkan mereka tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber informasi membuat mereka tidak mampu mengadaptasikan diri dengan berbagai perkembangan serta minimnya pengetahuan dan keterampilan;
4. *Kerentanan*, keluarga miskin biasanya tidak memiliki cadangan baik berupa uang atau makanan untuk menghadapi keadaan darurat. Apabila terjadi keadaan darurat seperti ada keluarga yang tiba-tiba sakit mereka tidak mampu membiayai sehingga biasanya mereka menjual barang milik mereka yang ada, atau mereka berhutang kepada tetangga untuk membiayai perawatan. Keluarga miskin biasanya mereka makan satu hari hanya satu kali

dengan kadar gizi yang sangat tidak memadai, membuat mereka sangat rentan terhadap penyakit menular, atau mudah terserang wabah penyakit;

5. *Ketidakberdayaan*, karena ketidakberdayaan orang miskin seringkali tidak berdaya menghadapi rentenir atau berbagai bentuk eksploitasi, yang membuat mereka tetap terkungkung dalam lilitan kemiskinan. Karena ketidakberdayaan itu pula seringkali orang miskin ditipu serta diperlakukan tidak adil dalam urusan-urusan administrasi pemerintahan atau urusan-urusan perkara, mereka tidak kuasa menghadapi aparat pemerintah yang sering menak-utakuti.

Emil Salim, mengemukakan lima karakteristik kemiskinan, sebagai berikut:

- 1) Penduduk miskin pada umumnya tidak memiliki factor produksi sendiri;
- 2) Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri;
- 3) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah;
- 4) Banyak di antara mereka tidak mempunyai fasilitas;
- 5) Di antara mereka berusaha relative muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.

Kecuali yang dikemukakan Emil Salim di atas, garis kemiskinan ditetapkan juga berdasarkan tingkat pendapatan per bulan perkapita per tahun atau per kapita per bulan. Bank Dunia menetapkan tingkat pendapatan per kapita per tahun serendah US \$ 75 untuk daerah perkotaan dan \$ 50 untuk daerah pedesaan sebagai garis kemiskinan. Sedangkan Biro Pusat Statistik (BPS) menggunakan kriteria tingkat pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan sebagai garis kemiskinan. Kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per orang per hari, sedangkan pengeluaran bukan makanan terdiri dari kebutuhan minimum untuk perumahan, bahan makan, sandang, pendidikan, kesehatan dan transportasi, dan garis kemiskinan berdasarkan pengeluaran ini berbeda pada setiap daerah atau provinsi. Selain itu, **Sajogyo** menggunakan kriteria pengeluaran sebagai porsi terhadap pendapatan setara beras sebagai dasar penetapan garis kemiskinan, yakni untuk kategori miskin pada daerah perkotaan 480 Kg, daerah pedesaan 320 Kg, miskin sekali daerah perkotaan 360 Kg, daerah pedesaan 240 Kg, sedangkan penduduk paling miskin 270 Kg, untuk daerah perkotaan 180 Kg untuk daerah pedesaan.

Kemiskinan dikategorikan ke dalam dua aspek, yakni *kemiskinan relatif* dan *kemiskinan absolut*. Kemiskinan relatif adalah, kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara suatu tingkat pendapatan dengan tingkat pendapatan lainnya. Seseorang yang tergolong kaya dalam suatu masyarakat tertentu, bias jadi merupakan orang miskin dalam masyarakat lain. Sedangkan kemiskinan absolut adalah, suatu keadaan kemiskinan yang ditentukan dengan

terlebih dahulu menetapkan garis tingkat pendapatan minimum. Orang-orang yang berpendapatan di atas tingkat pendapatan minimum tersebut dikategorikan sebagai bukan orang miskin. Sedangkan orang-orang yang berpendapatan kurang dari itu disebut orang miskin.

B. Beberapa Pandangan Tentang Akar Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan dilihat oleh para ahli terutama ahli ilmu sosial diakibatkan oleh berbagai sebab. Ada yang melihat kemiskinan berkaitan erat dengan budaya dari suatu masyarakat. Kemiskinan menurut pandangan budaya ini melihat kemiskinan disebabkan karena masyarakat hidup malas, kurang ada motivasi untuk bekerja keras merubah hidup mereka. Etos kerja pada masyarakat sangat rendah, walaupun sumber daya alam tersedia. Motivasi dan etos kerja yang rendah ini terkait erat juga dengan pandangan hidup atau world view masyarakat, yang menganggap kerja untuk hidup masa depan yang lebih baik tidak terlalu penting. Pandangan ini membuat masyarakat tidak mau bekerja keras dan menata hidup mereka dengan baik. Sikap hemat dan menabung bagi mereka tidak ada guna, membuat mereka hidup boros dan konsumtif. Pada akhirnya masyarakat ini tetap hidup dalam keadaan miskin, tidak berubah dan lamban terhadap kemajuan.

Ahli lain melihat kemiskinan suatu masyarakat disebabkan karena ketidakadilan. Ketidakadilan disebabkan karena struktur yang menciptakan ketidakseimbangan dalam kepemilikan faktor-faktor produksi. Misalnya kepemilikan tanah yang tidak merata, dimana sekelompok orang menguasai sebagian besar tanah, sedangkan sebagian orang tidak menguasai tanah, dan yang tidak menguasai tanah ini mereka menjadi buruh tani. Yang menguasai tanah ini sudah tentu mereka memiliki kemudahan akses untuk mendapatkan modal dari lembaga modal resmi serta berbagai kemudahan lain. Sementara yang tidak memiliki tanah mereka tetap bekerja sebagai buruh tani atau penggarap yang diberi upah oleh pemilik tanah atau tuan tanah. Struktur kepemilikan ini menciptakan ketidakseimbangan dalam masyarakat yang membuat masyarakat yang tidak memiliki tanah dan modal tidak berdaya dan terus bergantung hidup mereka kepada tuan tanah atau pemilik modal. Ketergantungan para buruh tani atau penggarap ini yang kemudian mengakibatkan terciptanya struktur kemiskinan yang melembaga dalam masyarakat.

Hal lain sama terjadi pula dalam masyarakat industri di mana para pemilik kapital besar menguasai sebagian besar perusahaan-perusahaan produksi yang penting. Mereka menguasai sektor ekonomi pasar atau ekonomi modern, yang akhirnya membuat sektor ekonomi tradisional tidak dapat berkembang karena tidak mampu bersaing dengan sektor ekonomi modern.

Berkembangnya sektor ekonomi modern didukung pula oleh kebijakan politik pemerintah karena dianggap sektor ini menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Oleh sebab itu sektor ini pun lebih banyak mendapat kemudahan dari pemerintah. Sebaliknya lambannya perkembangan sektor ekonomi tradisional disebabkan karena kurangnya mendapat dukungan politik pemerintah, sehingga mereka kurang mendapat kemudahan fasilitas untuk mengembangkan usahanya. Mereka seringkali diabaikan dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Padahal sektor ekonomi tradisional ini diguluti oleh sebagian besar masyarakat di pedesaan maupun perkotaan. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan ketidakseimbangan struktur, yang pada gilirannya melahirkan ketidakberdayaan kelompok lemah dan mengakibatkan kemiskinan yang luas di masyarakat.

Sejalan dengan pandangan di atas, secara singkat terdapat dua pandangan klasik tentang akar penyebab kemiskinan, yakni pandangan ***konservatif dan pandangan liberal***. Pandangan **konservatif**, melihat kemiskinan disebabkan karena orang miskin itu sendiri. Menurut pandangan ini orang miskin dinilainya ***bodoh, malas***, tidak punya motivasi berprestasi yang tinggi, serta tidak memiliki ketrampilan. Semua itu berkaitan dengan mentalitas dari orang miskin itu sendiri. Oleh karena itu orang miskin karena kulturenya itu membuat mereka tidak dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan proses-proses sosial yang ada.

Sedangkan menurut pandangan **liberal**, kemiskinan terjadi karena ***struktur sosial kurang memberikan kesempatan*** kepada orang miskin untuk berusaha. Mereka melihat ketidakadilan dan diskriminasi membuat orang miskin tidak dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki. Struktur sosial yang tidak adil ini menutup pelayanan dan fasilitas public bagi orang miskin, membuat mereka tidak berdaya karena tidak punya kesempatan dan akses untuk berusaha. Pada akhirnya mereka tetap hidup dalam ketidakberdayaan dan kemiskinan. Pandangan liberal ini muncul dari **Marx**. Menurut **Marx**, timbulnya kemiskinan disebabkan oleh adanya perbedaan kekuasaan, posisi, legitimasi dalam sistim sosial. Keterbelakangan suatu masyarakat tidak terlepas dari eksploitasi kekuatan yang mendominasi atau monopoli kekuasaan baik politik maupun ekonomi, seperti penguasa terhadap rakyat, kaum borjuis terhadap kaum proletariat, majikan terhadap buruh, dst. Dalam istilah **Marx**, disebut *'the long per long'* (manusia menjadi mengsa atas sesamanya).

C. Jenis – Jenis Kemiskinan

Menurut **Sunyoto Usman** (2010: 125-127), ada tiga jenis kemiskinan, yaitu: a). ***Kemiskinan Absolut***; adalah ukuran kemiskinan yang lazimnya berorientasi pada kebutuhan

hidup dasar minimum anggota masyarakat (*sandang, pangan dan papan*). Menurutnya masing-masing negara mempunyai batasan, kemiskinan absolut yang berbeda-beda, sebab kebutuhan hidup dasar masyarakat yang dipergunakan sebagai acuan memang berlainan. Sebagai contoh kebutuhan masyarakat pedesaan berbeda dengan kebutuhan masyarakat perkotaan, dan begitu pula antara masyarakat desa pertanian dan desa nelayan. Namun konsep kemiskinan absolut sangat populer, terutama karena dianggap strategi bagi program-program pengentasan kemiskinan. b). **Kemiskinan Relatif**; adalah ukuran kemiskinan yang dirumuskan berdasarkan the idea of relative standar, yaitu dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Dasar asumsinya adalah kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya, dan kemiskinan pada waktu tertentu berbeda dengan waktu yang lain. Konsep kemiskinan ini diukur berdasarkan pertimbangan (*in terms of judgment*) anggota masyarakat tertentu, dengan berorientasi pada derajat kelayakan hidup. c). **Kemiskinan Subyektif**; adalah ukuran kemiskinan yang dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri. Konsep ini tidak mengenal a fixed yardstick, dan tidak memperhitungkan the idea of relative standard, yakni kelompok yang menurut ukuran kita berada di bawah garis kemiskinan.

Maka kemiskinan menurut sifat dasarnya dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu: (1) kemiskinan sementara (*transient poverty*) yaitu kemiskinan yang terjadi akibat krisis ekonomi, dan (2) kemiskinan kronik (*chronic poverty*) (Seldayo, et.al, 2003).

D. Kemiskinan di Pedesaan

Kemiskinan oleh beberapa ahli membedakan antara kemiskinan di pedesaan dengan perkotaan. Misalnya kemiskinan pedesaan atau perkotaan, secara metodologi dikategorikan ke dalam golongan atau tipologi daerah miskin, seperti identifikasi desa atau kecamatan miskin, miskin sekali, dan paling miskin (Rusli dkk, 1995). Berbeda dengan kemiskinan di pedesaan, kemiskinan perkotaan, kebanyakan disebabkan karena faktor urbanisasi, migrasi yang berkaitan dengan aspek-aspek kesempatan kerja, pendidikan dan keterampilan. Kondisi kemiskinan pedesaan biasanya dilihat dari potret desa atau wilayah yang tidak atau belum terjangkau akses pelayanan publik dengan penataan dan penduduk yang tidak teratur dan tidak sehat, sehingga masyarakat belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara baik dan maksimal.

Selanjutnya kemiskinan menurut pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh BPS (Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05) yang mengemukakan 14 kriteria atau variabel rumah tangga miskin, yaitu: (1) luasnya lantai bangunan tempat tinggal yang

dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari; (2) jenis lantai bangunan tempat tinggal terluas terdiri dari tanah/bambu/kayu berkualitas rendah; (3) jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas terdiri dari bambu/kayu berkualitas rendah; (4) fasilitas tempat buang air besar (jamban/kakus) digunakan secara bersama-sama atau menggunakan secara umum; (5) sumber air minum adalah mata air yang tidak terlindung/sungai/air hujan; (6) sumber penerangan utama bukan listrik; (7) jenis bahan bakar untuk memasak sehari-hari dari kayu/arang/minyak tanah; (8) jarang membeli daging/ayam/susu setiap minggunya; (9) anggota rumah tangga hanya mampu menyediakan makan dua kali dalam sehari; (10) tidak mampu membeli pakaian baru minimal satu stel setiap tahun; (11) bila jatuh sakit tidak berobat karena tidak ada biaya untuk berobat; (12) pekerjaan utama kepala keluarga sebagai buruh kasar dan atau tidak bekerja; (13) pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala keluarga SD ke bawah, dan (14) ada tidaknya barang dalam keluarga yang dapat dijual dengan nilai Rp. 500.000,- (BPS,2005; BPPKS, 2012). Selain PSE05, BPS pada tahun 2007 kembali mengumpulkan data kemiskinan mikro yang dikenal dengan nama SPDKP 2007. Dalam laporan SPDKP07 disebutkan beberapa kriteria umum Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) seperti dibahasakan BPPKS (2012), yaitu:

1. Sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok yang sangat sederhana,
2. Biasanya tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah,
3. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga,
4. Biasanya tidak/hanya mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan SLTP.

Dari pengertian kemiskinan menurut BPS di atas, terlihat bahwa BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka yang dipakai sebagai acuan dalam penelitian ini adalah kombinasi antara pengertian kemiskinan secara subjektif dari rumah tangga miskin, dan pandangan objektif tentang rumah tangga miskin dari BPS. Oleh karena itu, konsep kemiskinan ini dianggap lebih tepat apabila dipergunakan untuk memahami kemiskinan dan merumuskan cara atau strategi yang efektif untuk penanggulangannya. Penggalan tentang kemiskinan yang selama ini cenderung dilakukan pada batas angka-angka statistik makro yang kurang mendalam serta tidak

detail dalam mengungkap latar belakang masyarakat miskin. Pada sisi lain studi tentang kemiskinan juga cenderung kurang memiliki daya, guna pemecahan persoalan yang sifatnya praksis penanggulangan kemiskinan, sekaligus gagal mengungkap akar penyebab kemiskinan. Dan ada tiga sisi yang menjadi akar penyebab dari terjadinya kemiskinan struktural yaitu :

- 1) Pemahaman akan kemiskinan yang tidak tepat dan sepihak. Kemiskinan lebih dikaji dari aspek ekonomi saja. Aspek-aspek lain yang berkaitan erat dengan persoalan kemiskinan seperti aspek politik, kultural, serta sosial dikaji secara terpisah. Persoalan kemiskinan dipahami tanpa mengkaji dampak dari kebijakan publik atau pemerintah terhadap keberadaan rakyat miskin
- 2) Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak melibatkan masyarakat yang terkena sasaran, baik di tingkat perencanaan maupun sampai ke tingkat pelaksanaannya.
- 3) Tidak ada evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di perkotaan untuk melihat dampak yang terjadi.

E. Komunitas Perempuan Miskin

Laju pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan perkembangan teknologi serta berbagai sarana kehidupan di pedesaan tidak seiring dengan perkembangan kesejahteraan masyarakat, hal seperti ini terlihat adanya masyarakat miskin. Perempuan miskin adalah mereka yang kegiatan sehari-hari di sektor informal di desa maupun dipinggiran kota. Para mereka melakukan aktivitas setiap hari membantu keluarga sebagai ibu rumah tangga dan sebagai petani pekerja, dengan pendapatan yang tidak menentu. Dalam realitas di masyarakat, keberadaan perempuan memberikan kontribusi untuk diri sendiri dan keluarga, ketika pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang sangat membutuhkan pekerjaan (Gunawan, 2012).

Perempuan miskin melakukan peran ganda di keluarga sebagai orang-orang yang bekerja mengurus rumah tangga dan ekonomi keluarga, itulah salah satu citra dari seorang perempuan. Mungkin pernyataan itu ada benarnya, tapi pernahkah kita melihat sisi positif dari seorang perempuan? pernahkan kita menyadari betapa besar jasa seorang perempuan? Perempuan miskin pada dasarnya bekerja dengan jumlah jam kerja yang panjang di dalam keluarga. Secara tidak langsung perempuan miskin ikut berpartisipasi dalam upaya penyelamatan keluarga, meskipun mereka tidak pernah menyadari akan hal itu, bahkan mereka merasa hanya sebagai orang yang terpinggirkan (Nuraedah, 2014). Namun perempuan miskin masih banyak menghadapi banyak persoalan seperti; akses pelayanan public, kesejahteraan sosial, kesehatan reproduksi dan masalah kekerasan serta akses terhadap perlindungan sosial di masyarakat.

F. Tujuan Pemberdayaan Perempuan

Tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut Nugroho (2008), tujuan program pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini.
2. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
3. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri.
4. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.

G. Strategi Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik di domain publik maupun domestik. Menurut Zakiyah (2010), pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga. Pada zaman dahulu, muncul anggapan yang kuat dalam masyarakat bahwa kaum perempuan adalah konco wingking (teman di belakang) bagi suami serta anggapan warga nunut neraka katut (ke surga ikut, ke neraka terbawa). Kata nunut dan katut dalam bahasa Jawa berkonotasi pasif dan tidak memiliki inisiatif, sehingga nasibnya sangat tergantung kepada suami.
2. Memberi beragam ketrampilan bagi kaum perempuan. Strategi ini bertujuan agar kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki. Berbagai ketrampilan bisa diajarkan, misalnya; ketrampilan menjahit, menyulam serta berwirausaha dengan membuat kain batik dan berbagai jenis makanan.
3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin. Hal ini diperlukan mengingat masih menguatnya paradigma masyarakat bahwa setinggi-tinggi pendidikan perempuan toh nantinya akan kembali ke dapur. Inilah yang mengakibatkan masih rendahnya (sebagian besar) pendidikan bagi perempuan.

H. Program-program Pemberdayaan Perempuan

Menurut **Nugroho** (2008), terdapat beberapa program yang dapat ditawarkan untuk pemberdayaan perempuan, yaitu:

1. Penguatan organisasi kelompok perempuan di segala tingkat mulai dari kampung hingga nasional. Seperti misalnya PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), perkumpulan koperasi maupun yayasan sosial. Penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan lembaga agar dapat berperan aktif sebagai perencana, pelaksana, maupun pengontrol.
2. Peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam pemasaran sosial program-program pemberdayaan. Hal ini penting mengingat selama ini program pemberdayaan yang ada, kurang disosialisasikan dan kurang melibatkan peran masyarakat.
3. Pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring semua program pembangunan yang ada. Keterlibatan perempuan meliputi program pembangunan fisik, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
4. Peningkatan kemampuan kepemimpinan perempuan, agar mempunyai posisi tawar yang setara serta memiliki akses dan peluang untuk terlibat dalam pembangunan.
5. Peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha (skala industri kecil/rumah tangga hingga skala industri besar) dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas.

I. Indikator Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra ke-sejajaran antara laki-laki dan perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang atau sektor. Keberhasilan pemberdayaan perempuan dapat dilihat adanya indikator-indikator sebagai berikut (Suharto, 2003):

1. Adanya sarana yang memadai guna mendukung perempuan untuk menempuh pendidikan semaksimal mungkin.
2. Adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk berusaha memperoleh dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi diri mereka.
3. Meningkatnya jumlah perempuan mencapai jenjang pendidikan tinggi, sehingga dengan demikian, perempuan mempunyai peluang semakin besar dalam mengembangkan karier sebagaimana halnya laki-laki.
4. Adanya peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif dan pemerintahan.
5. Peningkatan keterlibatan aktivis perempuan dalam kampanye pemberdayaan pendidikan terhadap perempuan.

J. Model Pemberdayaan Perempuan Miskin.

Berbagai bidang masih senantiasa diperlukan upaya pemberdayaan perempuan agar terwujud kesetaraan akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota masyarakat. Di lain pihak, pada saat ini masih banyak kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan yang belum peka gender, yaitu belum mempertimbangkan perbedaan pengalaman, aspirasi dan kepentingan antara laki-laki dan perempuan serta belum menetapkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai sasaran akhir dari pembangunan (**Kwik Kian Gie, 2001: 3**). Untuk memperkecil kesenjangan tersebut maka kebijakan dan program pembangunan yang dikembangkan haruslah peka gender. Pemerintah melalui Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 menegaskan agar setiap daerah mengembangkan *kebijakan-kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan yang responsif gender*. **Sara H. Longwee** mengembangkan teknik analisis gender yang dikenal dengan "Kerangka Pemampuan Perempuan". **Metode Sara H. Longwee** mendasarkan pada *pentingnya pembangunan bagi perempuan, bagaimana menangani issue gender sebagai kendala pemberdayaan perempuan dalam upaya memenuhi kebutuhan spesifik perempuan dan upaya mencapai kesetaraan gender* (**Muttalib, 1993**).

Pemberdayaan perempuan mencakup tiga hal: (1) *capacity building* bermakna membangun kemampuan perempuan; (2) *cultural change* yaitu perubahan budaya yang memihak kepada perempuan; (3) *structural adjustment* adalah penyesuaian struktural yang memihak perempuan. Upaya pemberdayaan diarahkan pada tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui kesetaraan gender. Kriteria analisis yang digunakan dalam metode ini terdiri atas 5 (lima) kriteria, yaitu: (1) *kesejahteraan*; (2) *akses*; (3) *penyadaran*; (4) *partisipasi*; (5) *kontrol*.

Dimensi kesejahteraan secara sederhana dapat diukur dengan terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, perumahan, dsb, sejauh mana dinikmati oleh perempuan dan laki-laki.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok, laki-laki atau perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan dukungan data kualitatif dan kuantitatif, khususnya berkaitan dengan pengembangan model pemberdayaan perempuan miskin. Menurut Burhan Bungin (2001: 48-50) metode deskriptif bertujuan menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi obyek penelitian. Pada kajian ini memakai metode deskriptif kuantitatif, dan dibantu metode survey sesuai permasalahan dan tujuan penelitian. Dan unit-

unit yang diteliti adalah individu atau orang-orang (*perempuan miskin*) dan kelompok yang mewakili komunitas perempuan miskin di Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Salahutu, Leihitu dan Leihitu Barat.

Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*) yaitu pada di tempat – tempat yang mewakili kecamatan terdapat komunitas perempuan miskin melakukan aktivitas setiap hari yakni di Kecamatan Salahutu, Leihitu, dan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Sedangkan Populasi: adalah keseluruhan subyek penelitian atau sejumlah keseluruhan dari unit analisis yang karakteristiknya akan diduga (Solimun, 2002:168). Dengan populasi adalah jumlah penduduk miskin di Kabupaten Maluku Tengah di 18 Kecamatan berjumlah 74,8 ribu orang atau (20,4%), Sampel: Sampel penelitian harus dapat mewakili keadaan populasi, yang berarti data yang diperoleh adalah data sampel. Sugiyono (1994:56), mengatakan sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu ukuran sampel yang diberlakukan harus benar-benar representative (*mewakili*). Maka ukuran sampel dalam penelitian ini adalah 60 responden, (mewakili Kec Salahutu, Leihitu, Leihitu Barat, abupaten Maluku Tengah).

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari *data primer* dan data *sekunder*. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden, dan observasi lapangan. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai kepustakaan dan dokumen, antara lain dari (1) instansi terkait (badan, dinas, kantor dalam lingkungan pemerintah Maluku Tengah, (2) laporan hasil penelitian yang relevan, (3) dan berbagai informasi lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian.

Mengamati populasi penelitian (wilayah penelitian) yang begitu besar, maka penelitian ini akan menggunakan sampel perempuan miskin, di Kecamatan (Salahutu, Leihitu dan Leihitu Barat). Dengan menggunakan teknik sampling “*Pruposive Sampling Are*“ yakni jumlah sampel disesuaikan dengan tingkat representatif sampel berdasarkan masalah dan tujuan penelitian serta karakteristik populasi. Artinya penyebaran atau keterwakilan sampel (perempuan miskin) terfokus pada kecamatan- kecamatan yang mudah dijangkau di wilayah Kabupaten Maluku Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Komunitas Perempuan Miskin

Pendidikan responden merupakan efek langsung dari proses memberi pengetahuan, pendidikan tentang berbagai hal yang berhubungan dengan dunia/pandangan bagaimana seseorang bisa keluar dari rantai kemiskinan, berikut ini akan disajikan pendidikan formal responden

Tabel 01. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentasi
SD Tamat	8	13,33
SD Tidak Tamat	15	25,00
SMP/ sederajat Tamat	10	16,66
SMP Tidak Tamat	16	26,66
SMA/ sederajat Tamat	2	3,33
SMA Tidak Tamat	9	15,00
Total	60	100,00

Sumber: Hasil Penelitian 2023

Data tabel di atas menunjukkan gambaran kemiskinan di wilayah penelitian ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan perempuan miskin. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat tingkat pendidikan perempuan miskin yang tidak tamat SD 25,00 persen dan SMP Tidak Tamat sebanyak 26,66 persen dan berpendidikan SMP atau sederajat sebanyak 16,66 persen, dan berpendidikan SMA atau sederajat sebanyak 3,33 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan miskin memiliki keterbatasan akses pendidikan. Selanjutnya mengenai kondisi tempat tinggal perempuan miskin,

Berdasarkan hasil penelitian terkait kondisi rumah atau tempat tinggal yang dimiliki oleh perempuan miskin di wilayah sampel didapatkan gambaran pada tabel di bawah ini;

Tabel 02. Kondisi Rumah Tinggal

Kriteria Rumah Tinggal Kurang Layak Huni	Frekuensi	Presentasi
Bangunan rumah belum permanen	11	18,33
Rumah permanen tembok tidak diplester, lantai belum diplester	20	33,33
Rumah permanen tembok di plester, lantai belum diplester	29	48,33
Total	60	100,00

Sumber: Hasil Penelitian 2023

Tabel di atas menunjukkan gambaran kemiskinan di daerah sampel ditinjau berdasarkan banyaknya rumah tinggal yang dihuni oleh perempuan miskin, yang kondisinya masih belum layak huni, yakni bangunan rumah yang belum permanen 18,33 persen, tembok yang tidak diplester dan lantai yang belum diplester 33,33 persen dan tembok yang diplester dan lantai belum plester 48,33 persen. Begitu pula rata-rata pendapatan perempuan miskin dalam sebulan seperti tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 03. Pendapatan Rata-Rata Tiap Bulan

Pendapatan Rata-Rata Tiap Bulan	Frekuensi	Presentasi
---------------------------------	-----------	------------

< Rp. 300.000,-	35	58,33
Rp. 300.000 – Rp. 500.000,-	25	41,66
Total	60	100,00

Sumber: Hasil Penelitian 2023

Tabel di atas menunjukkan gambaran kemiskinan di daerah sampel ditinjau berdasarkan tingkat pendapatan rumah tangga perempuan miskin, yakni kelompok perempuan miskin berpenghasilan kurang dari Rp. 300.000,- sebanyak 58,33 persen dan kelompok perempuan miskin yang berpenghasilan antara Rp. 300.000,- s/d Rp. 500.000,- sebanyak 41,66 persen.

B. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Perempuan di Kecamatan Salahutu, Leihitu dan Leihitu Barat

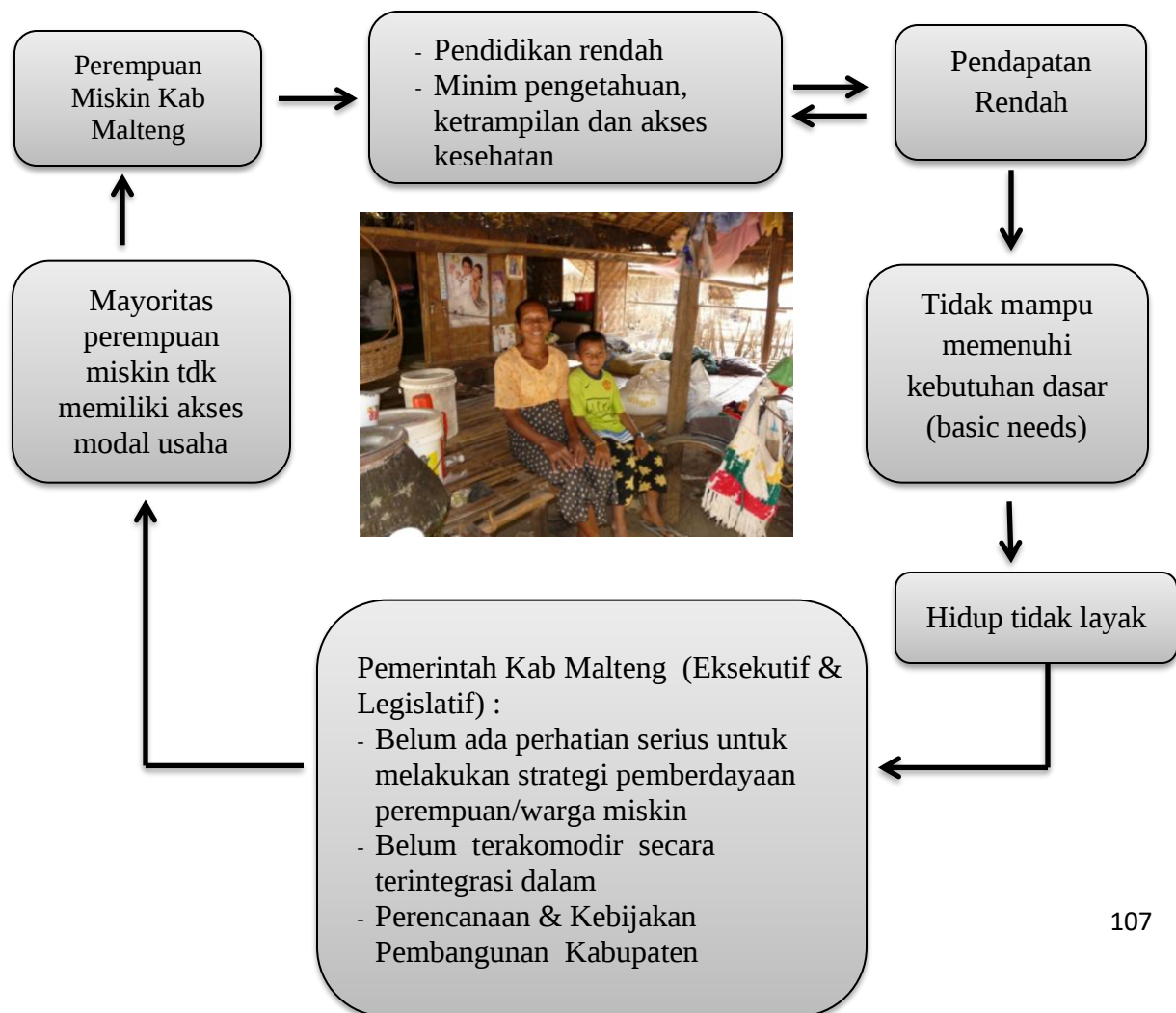
Dari karakteristik tersebut di atas dapat memberi gambaran untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan perempuan di Kecamatan Salahutu, Leihitu dan Leihitu Barat dari perspektif perempuan miskin sendiri sebagai berikut :

1. Rendahnya tingkat pendidikan membuat banyak perempuan masih tidak bisa memiliki banyak pilihan untuk menentukan aspirasi hidupnya. Dan tamat dan tidak tamat sekolah dasar maupun sekolah lanjutan pertama, maka mereka tidak memiliki bekal keterampilan tertentu. Dalam perspektif teori kemiskinan, salah satu faktor yang berpengaruh dalam menyumbang kemiskinan di pedesaan adalah kesulitan kesempatan berusaha dan bekerja. Perspektif ini tidak saja terkonstruksi karena alasan teoritis semata, tetapi memiliki pijakan secara empirik karena berlaku universal di desa-desa lain.
2. Tingkat pendapatan yang diperoleh perempuan miskin rendah, bekerja sebagai buruh tani, < dari Rp. 300.000,- yang dikategorikan sebagai pendapatan yang kecil dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Karena dengan pendapatan yang kecil itu tidak dapat memenuhi dengan baik semua kebutuhan rumah tangga miskin terutama kebutuhan dasar. Apalagi bila kesehatan mereka terganggu atau sakit, disamping kurangnya biaya untuk berobat. Kondisi ini yang mengakibatkan kesejahteraan perempuan miskin tidak berubah dari kondisi “kerangkeng kemiskinan” yang berkepanjangan, karena pendapatan yang diperoleh dari hasil sebagai buruh tani hanya untuk mereka bertahan hidup setiap hari.
3. Akses kesehatan; kemiskinan juga menjadi salah satu penyebab dari terbatasnya kesempatan seseorang untuk mengakses layanan kesehatan, khusus perempuan miskin di perdesaan. Pelayanan kesehatan bagi perempuan juga terkait dengan kesehatan reproduksi dan kesehatan anak-anak dalam keluarga. Dalam pelayanan kesehatan bagi perempuan (punya keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya, namun tidak berobat), karena persoalan biaya kesehatan.
4. Pengembangan Model Pemberdayaan Perempuan Miskin; Program-program pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mewujudkan kesetaraan peran, akses, dan kontrol perempuan secara yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat selama ini merupakan upaya untuk senantiasa mewujudkan terciptanya dan terdistribusinya manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki berimbang. Kurangnya perhatian dan intensitas serta kesinambungan program pemberdayaan perempuan merupakan salah satu penyebab belum terciptanya kesetaraan gender.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih giat, intensif, sungguh-sungguh, dan berkesinambungan untuk membangun kesetaraan gender melalui program-program pemberdayaan perempuan. Berbagai langkah dapat dilakukan untuk melakukan pemberdayaan bagi perempuan miskin dengan mengembangkan model pemberdayaan kewirausahaan kelompok atau keluarga, supaya dapat mengembangkan ekonomi keluarga, demi mencapai kesejahteraan keluarga.

5. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok, perempuan atau laki-laki tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dalam kondisi seperti itu, perhatian dari pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terhadap mereka (*perempuan miskin*) belum nampak baik dalam bentuk program pemberdayaan serta akses (kesehatan, pendidikan, serta lembaga keuangan) maupun kebijakan politik dari lembaga legislatif dalam rangka memberdayakan mereka. Belum adanya perhatian pemerintah Kabupaten Maluku Tengah & Legislatif (*policy makers*) secara serius terhadap program pemberdayaan bagi komunitas perempuan miskin, serta perencanaan dan kebijakan yang belum menjadikan mereka diberdayakan dan masih tetap hidup dalam kondisi ketidakberdayaan dan kemiskinan (*tidak layak*) yang berkepanjangan.

Kondisi dan matarantai Perempuan miskin di Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dikemukakan di atas, dapat divisualkan dengan gambar di bawah ini:



Pengembangan Model Pemberdayaan
Kewirausahaan

KESIMPULAN.

Dari deskripsi tentang karakteristik responden di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sbb:

1. Komunitas perempuan miskin di Kabupaten Maluku Tengah umumnya mereka telah berkeluarga serta memiliki beban tanggungan keluarga. Pekerjaan pokok sebagai buruh tani (50,%), swasta (26,66) dan jasa lainnya (23,33%). Tingkat pendidikan yang dimiliki rata-rata tidak tamat sekolah dasar.
2. Dalam melakukan aktivitas sebagai buruh tani kebanyakan dilakukan sendiri oleh ibu-ibu (perempuan) /ibu rumah tangga atau yang telah berkeluarga. Hanya sedikit perempuan (ibu rumah tangga) yang melakukan aktivitas sebagai pekerja swasta di luar rumah, pekerja jasa, dengan membantu menjadi pencuci pakaian keluarga lain guna memperoleh tambahan pendapatan bagi keluarga.
3. Dari pendapatan yang diperoleh sebagian besar dibelanjakan untuk kebutuhan makan setiap hari disamping sebagian untuk kebutuhan pendidikan anak mereka. Mereka perempuan berpenghasilan kurang dari Rp. 300.000,- sebanyak 58,33 persen dan kelompok perempuan miskin yang berpenghasilan antara Rp. 300.000,- s/d Rp. 500.000,- sebanyak 41,66 persen. Sebagai makanan substitusi sebagian kecil keluarga sampel makan umbi-umbian lokal + ikan dan sayur. Dengan pendapatan dan menu makan seperti itu, maka tidak dielakkan perempuan sampel sering menderita penyakit terutama batuk, batuk ditambah pilek, dan asma. Kebiasaan responden sampel bila sakit lebih banyak memilih ke Puskesmas terdekat, tetapi ada juga responden yang memilih berobat sendiri melalui beli obat di toko obat atau apotik.
4. Menyangkut tempat tinggal atau rumah responden sampel, kebanyakan berstatus rumah sendiri, namun ada juga yang tinggal dengan orang tua. Jenis rumah yang dimiliki atau ditempati sebagian besar masih semi permanen, diikuti permanen, Tetapi ada juga masih darurat atau tidak layak huni.
5. Bagi pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan pihak-pihak terkait, hasil penelitian ini dengan melakukan kebijakan strategi pemberdayaan perempuan miskin, dengan pengembangan model pemberdayaan kewirausahaan bagi kelompok atau warga miskin di desa, agar mereka dapat diberdayakan dan keluar dari persoalan kemiskinan.
6. Metode yang digunakan untuk memperdayakan perempuan miskin di kabupaten Maluku tengah salah satunya dengan menggunakan ". **Metode Sara H. Longwee** mendasarkan pada pentingnya pembangunan bagi perempuan, bagaimana menangani isue gender sebagai kendala pemberdayaan perempuan dalam upaya memenuhi kebutuhan spesifik perempuan dan upaya mencapai kesetaraan gender.

REFERENSI

1. Biro Pusat Statistik Maluku, Profil Kemiskinan Provinsi Maluku, 2019.
2. Basuki, A. & Prasetyo, Y.E. (2007). Me-musiumkan Kemiskinan. Surakarta: PATTIRO Surakarta.
3. Mansy, Kredit Mikro untuk Masyarakat Miskin, Kupang, Antara News 2009.
4. Dony Abdul, Pengentasan Kemiskinan Lewat UMKM, Suara Karya, 2005
5. Sri Marwanti, Ismi Dwi Astuti, 2011, Model Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karanganyar,
6. Hastuti dan Dyah Respati, 2011, Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Pedesaan, Lereng Merapi Selatan DIY,
7. Siti Hasanah, 2013, Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi berkeadilan, <http://dx.doi.org/10.33603/reformasi.v2i1.1451>
8. Wahyu Tjiptaningsih, 2018, Pemberdayaan Perempuan dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga Di desa Sindeng kempeng Kec Grege Kab Ciribon,
9. Alizar Isna dan Syah Firdaus, 2017, Prospek Pemberdayaan Perempuan di Desa Tumiyang Kabupaten Banyumas: Studi Evaluasi Implementasi Program P2MPD,
10. Marwanti, S. & Astuti, D. (2011). Model Pemberdayaan Perempuan Miskin melalui Pengembangan Kewira-usahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karang Anyar. SEPA, Vol 9 N0 1, September 2012.
11. Nunung Nurwati, Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan, 2012, url: <http://jurnal.unpad.ac.id/kependudukan/article/view/doc1>
12. Nugroho. 2008, Gender dan Administrasi Publik Studi tentang Kualitas Kesetaraan dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
13. Icha Duwi Meidha Sari, dkk, Pemberdayaan Perempuan Pesisir Dalam Mewujudkan Kampung Krumi Untuk Meningkatkan Perekonomian Desa Bendar, 2019. url: <https://journal.unilak.ac.id/index.php/dinamisia/article/view/2729>
14. Nugraha Setiawan, Struktur Ketenagakerjaan Dan Partisipasi Angkatan Kerja Di Pedesaan Indonesia: Analisis Hasil Sakernas 2006, Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol.10, No.2, Juli 2008: 100-11. url : <http://jurnal.unpad.ac.id/kependudukan/article/view/4028/1>
15. Safri Miraj, Sumarmo, Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Proses Pendidikan Nonformal, Upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Halmaera Utara, 2019, url: <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc/article/view/8051>
16. Sulistyani, A.T. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
17. Suharto, Edi. 2003. Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial. Bandung: Mizan.